

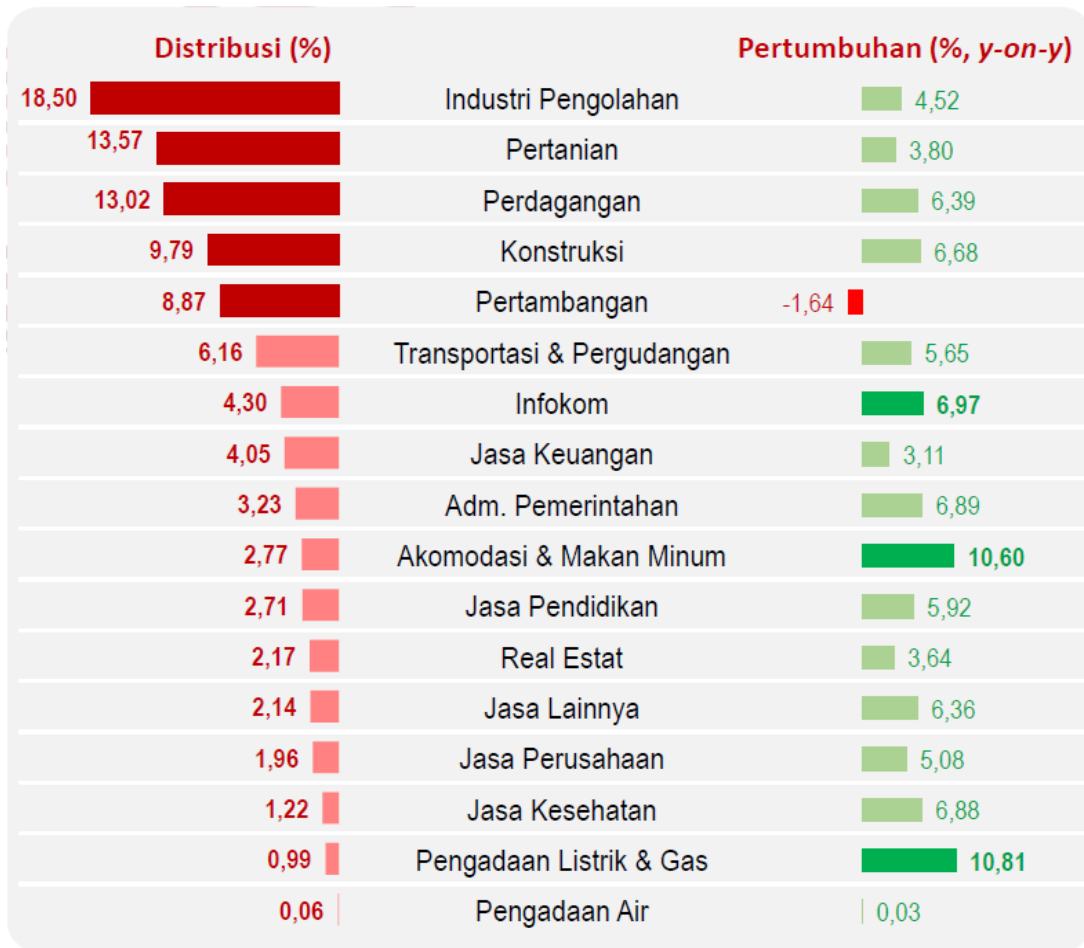
**EVALUASI KRITIS KINERJA 2
TAHUN PEMERINTAHAN
PRABOWO – GIBRAN:
MEMPERTANYAKAN ARAH DAN
KEBIJAKAN INDUSTRI
NASIONAL**



Ahmad Heri Firdaus
Centre of Industry, Trade and Investment
INDEF

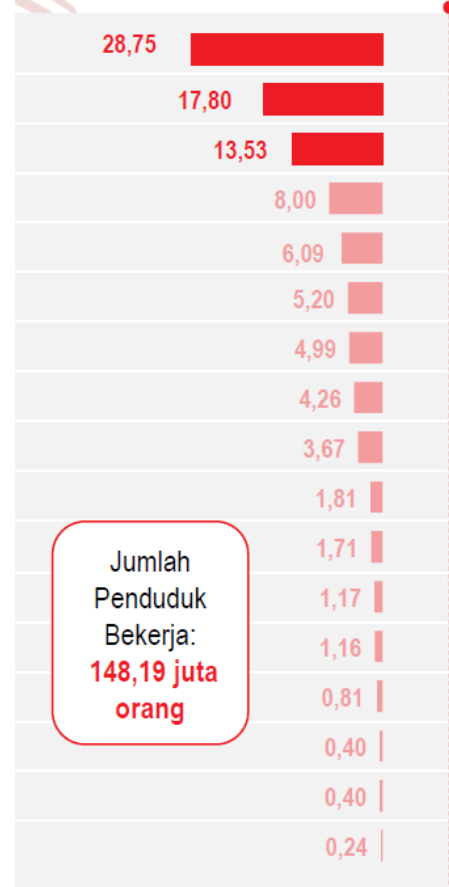
Pertumbuhan dan Penyerapan Tenaga Kerja

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral



Tenaga Kerja Sektoral

Distribusi Penduduk Bekerja (%), Mei 2026



Perubahan (juta orang) Feb 2026–Mei 2026



Sumber: BPS, 2026

- Pertumbuhan tidak ditopang oleh sektor–sektor penyerap tenaga kerja besar dan sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB

►► PMI® Manufaktur Indonesia dari S&P Global

PMI® Manufaktur Indonesia dari S&P Global

Indeks, sa, >50 = peningkatan m/m



Data dikumpulkan pada tanggal 10–23 September 2026.

Sumber: S&P Global PMI. ©2026 S&P Global.

- Menurut data terbaru survei PMI® dari S&P Global, kondisi bisnis sektor manufaktur Indonesia menguat pada bulan September. Produksi dan pesanan baru kembali meningkat, didukung oleh pertumbuhan ekspor, sementara perusahaan menambah tenaga kerja. Stok input kembali ditingkatkan seiring meredanya tekanan biaya pada bulan tersebut.

Dengan angka di atas 50 menunjukkan peningkatan secara keseluruhan dibandingkan bulan sebelumnya dan angka di bawah 50 menunjukkan penurunan secara keseluruhan.

Headline PMI meningkat di atas ambang batas tidak ada perubahan sebesar 50 pada bulan September, menjadi 52,4 dari 49,8 pada bulan Agustus.

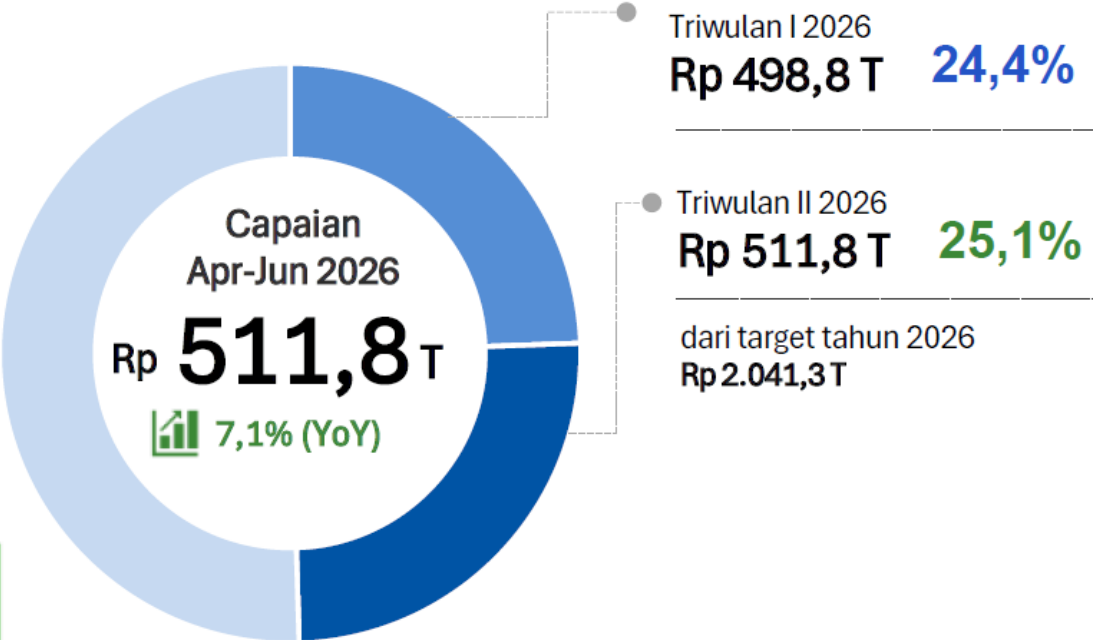
Angka terbaru menunjukkan perbaikan terkuat pada kondisi bisnis manufaktur secara keseluruhan sejak bulan Februari, tepat sebelum pecahnya perang di Timur Tengah. Selain itu, angka headline PMI mendapat kontribusi positif dari kelima komponennya pada bulan September.

Pertumbuhan Industri Pengolahan Kian Tertekan

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemulihan manufaktur masih menghadapi berbagai hambatan struktural seperti:

- Tingginya biaya energi;
- Ketergantungan bahan baku impor;
- Pelemahan permintaan ekspor;
- Meningkatnya tekanan persaingan produk impor.
- Padahal, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, industri manufaktur seharusnya mampu tumbuh secara konsisten di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

►► Capaian Realisasi Investasi vs Pertumbuhan Ekonomi vs Penyerapan Tenaga Kerja (Triwulan II Tahun 2026)



Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia



742.293 orang
5,1% (QoQ)

Keterangan: Menggunakan Kurs APBN USD 1 = Rp 16.500,00; T= Triliun



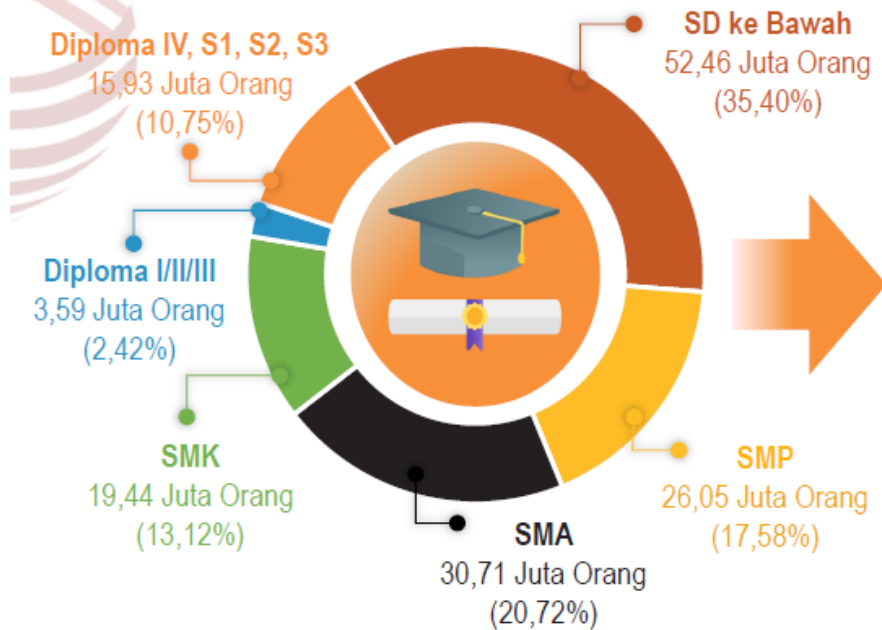
- Investasi Tumbuh 7,1% Tapi Ekonomi Hanya tumbuh 5,29%, kondisi ini melanjutkan dari periode-periode sebelumnya
- Tambahan Penyerapan Tenaga Kerja Feb-Mei menurut BPS mencapai 522 ribu orang, namun catatan BKPM sepanjang Tw II, dari realisasi investasi sudah menyerap TK sebanyak 742,3 ribu orang.

Investasi tetap tumbuh, namun belum cukup kuat menjadi mesin pertumbuhan baru

- Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan.
- Namun jika dibandingkan target pertumbuhan ekonomi menuju 8%, laju investasi saat ini masih relatif belum memadai.
- Beberapa tantangan investasi masih terlihat:
 - ketidakpastian global,
 - biaya logistik tinggi,
 - masih terbatasnya investasi teknologi tinggi,
 - lambatnya hilirisasi pada beberapa sektor.
- Artinya, Indonesia masih membutuhkan peningkatan investasi produktif yang menghasilkan ekspansi kapasitas industri.

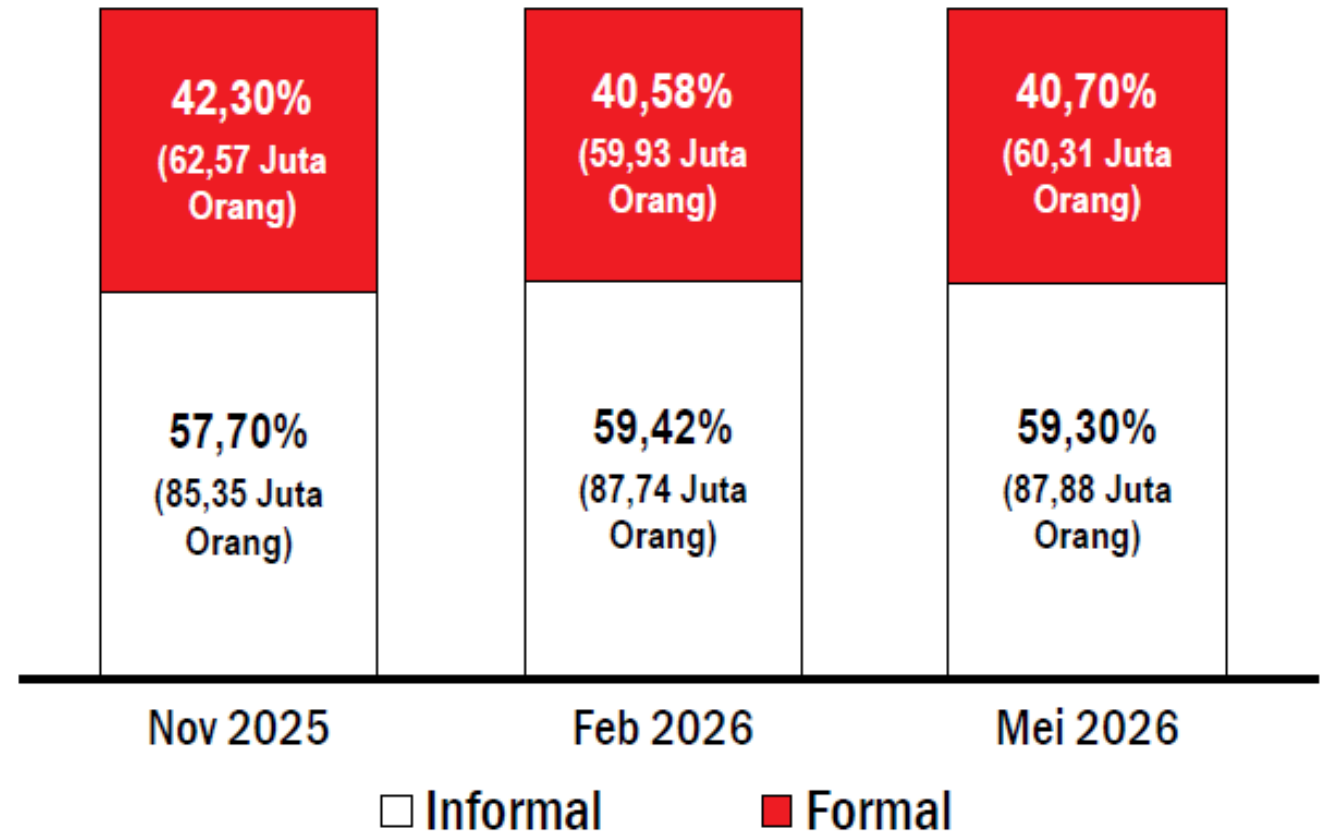
Kualitas Penduduk yang Bekerja (Tenaga Kerja) Masih Cukup Rendah

Sekitar **13,18%** dari total penduduk **bekerja** berpendidikan **tinggi** (Diploma ke Atas)



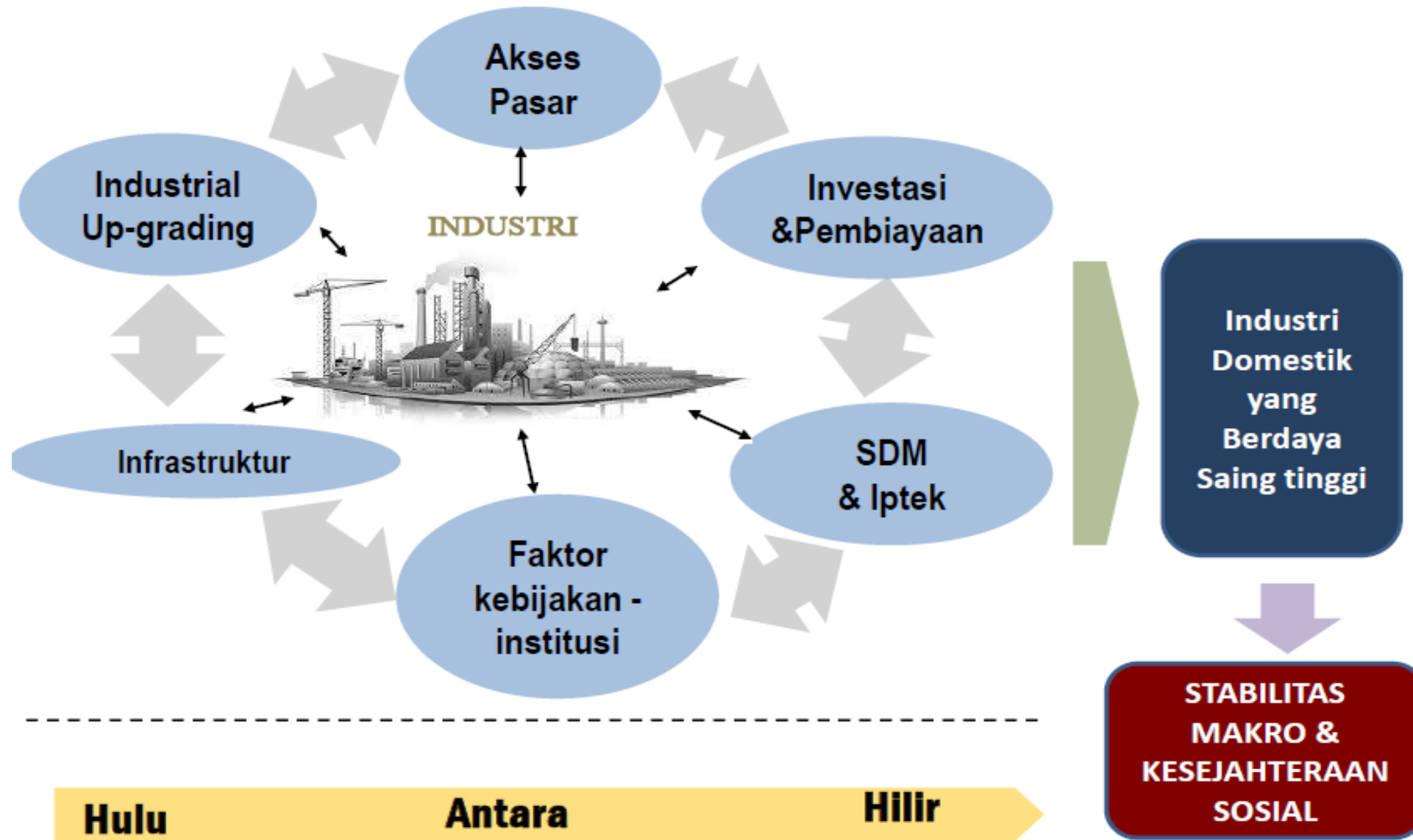
Selama Februari 2026-Mei 2026, proporsi penduduk bekerja mengalami peningkatan pada jenjang pendidikan SMA, SMK, Diploma I/II/III, dan Diploma IV, S1, S2, S3.

JUMLAH DAN PERSENTASE PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL, *November 2025–Mei 2026*



Sumber: BPS, 2026

INDUSTRI **BELUM** MENDAPAT DUKUNGAN DARI SEGALA ASPEK



8 (DELAPAN) PERSOALAN MENDASAR PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Kebijakan Industri Belum Terintegrasi Secara Konsisten

- Persoalannya adalah kebijakan perindustrian, perdagangan, investasi, energi, perpajakan, dan pembiayaan belum selalu berjalan dalam satu arah. Industri membutuhkan bahan baku impor yang lancar, sementara pembatasan impor atau perubahan tata niaga dapat mengganggu pasokan. Di sisi lain, produsen lokal membutuhkan perlindungan dari praktik perdagangan yang tidak adil.
- Survei BIG Consensus 2026 terhadap 58 responden dari asosiasi industri menemukan bahwa 34,48% menilai regulasi kurang konsisten dan 20,69% menilai sangat tidak konsisten. Temuan ini merupakan sinyal dari pelaku usaha, bukan representasi statistik seluruh perusahaan Indonesia.
- Kritik: pemerintah belum cukup berhasil membangun arsitektur kebijakan industri yang konsisten dari hulu sampai hilir.

2. Hilirisasi Terlalu Berorientasi pada Pembangunan Fasilitas Pengolahan

- Investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun pada 2025. Ini merupakan capaian penting, tetapi nilai investasi yang besar belum otomatis membuktikan bahwa Indonesia telah menguasai teknologi, desain produk, rekayasa industri, riset, dan merek sendiri.
- Risiko yang perlu diwaspadai adalah terbentuknya enclave industry: kawasan industri yang menghasilkan ekspor bernilai besar, tetapi keterkaitannya dengan pemasok lokal, industri mesin, jasa rekayasa, dan industri pendukung nasional masih terbatas.
- Kritik: keberhasilan hilirisasi masih terlalu mudah dinilai berdasarkan jumlah proyek dan nilai investasi, bukan kedalaman transformasi industri.
- Yang seharusnya dilakukan: mengukur kandungan nilai tambah domestik, pembelian dari pemasok lokal, transfer teknologi, produktivitas, dan perkembangan produk turunan.

3. Penguasaan Teknologi dan Produktivitas Belum Menjadi Perhatian Dalam Kebijakan

- Pembangunan smelter, pabrik baterai, atau fasilitas pengolahan mineral merupakan tahap awal. Industrialisasi yang matang membutuhkan kemampuan mengembangkan proses produksi, menguasai teknologi mesin, meningkatkan efisiensi energi, membangun laboratorium, menghasilkan paten, dan menciptakan produk yang lebih kompleks.
- Analisis Lowy Institute pada Maret 2025 menyoroti ketergantungan industri nikel dan kendaraan listrik Indonesia pada investasi, teknologi, serta permintaan dari China sebagai salah satu kerentanan strategis.
- Kritik: Indonesia berisiko menjadi lokasi produksi global tanpa memperoleh bagian yang sebanding dari penguasaan teknologi dan aktivitas bernilai tambah tinggi.
- Yang seharusnya dilakukan: mengaitkan insentif industri dengan peningkatan R&D, pelatihan insinyur, kemampuan pemasok lokal, dan pengembangan teknologi domestik.

4. Perlindungan Industri Domestik Belum Cukup Terarah

- Pengendalian impor dan perlindungan pasar diperlukan ketika terjadi dumping, lonjakan impor yang merugikan, atau persaingan yang tidak setara. Namun, kebijakan yang tidak membedakan bahan baku, barang modal, barang antara, dan barang jadi dapat meningkatkan biaya industri nasional sendiri.
- Survei BIG Consensus 2026 menunjukkan bahwa pelemahan daya beli disebut sebagai hambatan oleh 72,41% responden, sedangkan serbuan produk impor dan persaingan harga tidak sehat masing-masing disebut oleh 34,48%.
- Kritik: kebijakan perdagangan harus mampu melindungi produsen domestik tanpa menciptakan kelangkaan input atau meningkatkan biaya produksi secara tidak perlu.
- Yang seharusnya dilakukan: memperkuat pengawasan impor barang jadi yang bermasalah, menerapkan instrumen trade remedies berbasis bukti, dan menjaga akses bahan baku serta mesin bagi industri yang belum dapat memasok kebutuhannya dari dalam negeri.

5. Keberhasilan Investasi Lebih Menonjol Daripada Kualitas Investasi

- Tingginya realisasi investasi merupakan indikator penting, tetapi perlu dibedakan antara modal yang masuk, proyek yang selesai dibangun, fasilitas yang mulai beroperasi, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.
- Evaluasi harus menjawab apakah investasi menghasilkan pekerjaan formal dengan upah memadai, meningkatkan produktivitas, memperluas kapasitas ekspor, melibatkan UMKM pemasok, serta mendorong investasi lanjutan oleh perusahaan domestik.
- Ketidakpastian regulasi juga menjadi perhatian. Dalam survei BIG Consensus 2026, 43% responden menilai kebijakan pemerintah belum efektif mendorong daya saing industri.
- Kritik: mengejar realisasi investasi tanpa mengukur hasil dan kepastian usaha dapat menghasilkan pertumbuhan modal yang tidak sebanding dengan manfaat bagi perekonomian domestik.

6. Hubungan Industrialisasi dengan Penciptaan Lapangan Kerja belum cukup kuat

- Industri berbasis mineral dan modal besar dapat meningkatkan nilai ekspor dan output dengan kebutuhan tenaga kerja yang relatif lebih rendah daripada beberapa industri manufaktur padat karya. Karena itu, kenaikan output industri tidak otomatis menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
- Tantangan lainnya adalah produktivitas tenaga kerja, upah riil, kemampuan vokasi, dan keterhubungan industri besar dengan usaha kecil-menengah.
- Kritik: strategi industrialisasi perlu menyeimbangkan industri strategis padat modal dengan industri yang mampu menyerap tenaga kerja, seperti makanan olahan, tekstil dan pakaian, furnitur, alas kaki, elektronik, serta industri komponen.
- Yang seharusnya dilakukan: mengukur pekerjaan formal bersih, upah riil, produktivitas per pekerja, dan jumlah pemasok domestik yang naik kelas.

7. Strategi perdagangan belum cukup berorientasi pada peningkatan kompleksitas ekspor

- Surplus perdagangan atau peningkatan ekspor komoditas olahan tidak selalu berarti daya saing manufaktur secara menyeluruh meningkat. Ukuran yang lebih penting mencakup diversifikasi produk dan pasar, kandungan teknologi, nilai tambah domestik, serta kemampuan masuk ke rantai pasok global.
- Indonesia perlu memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional untuk membuka pasar bagi produk manufaktur yang lebih beragam, sekaligus menarik investasi yang membawa teknologi dan jaringan distribusi global.
- Kritik: kebijakan ekspor perlu bergeser dari sekadar meningkatkan nilai penjualan menjadi meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

8. Biaya lingkungan, energi, dan risiko jangka panjang belum boleh dianggap sebagai persoalan tambahan

- Hilirisasi membutuhkan pasokan energi besar, logistik yang efisien, pengelolaan limbah, dan kepatuhan lingkungan. Jika biaya eksternal tidak dihitung, manfaat ekonomi proyek dapat terlihat lebih besar daripada manfaat bersih yang sebenarnya diterima masyarakat.
- Kajian Lowy Institute juga menyoroti dampak lingkungan, persoalan ketenagakerjaan, dan tata kelola dalam ekspansi industri nikel.
- Kritik: industrialisasi tidak cukup dinilai dari output dan ekspor; biaya lingkungan, keselamatan pekerja, intensitas emisi, dan keberlanjutan energi juga harus masuk dalam evaluasi ekonomi.

Kesalahan Mendasar: Belum Ada Ukuran Keberhasilan Industrialisasi yang Memadai

Kedelapan persoalan di atas saling berhubungan. Masalah utamanya bukan karena semua program industri salah, melainkan karena instrumen kebijakan belum selalu dirancang untuk menghasilkan perubahan struktural yang sama.

Rantai masalah kebijakan industri

Orientasi pada proyek dan investasi

Nilai investasi, pembangunan pabrik, dan kapasitas produksi menjadi indikator yang paling terlihat.



Keterkaitan domestik belum terjamin

Pemasok lokal, R&D, teknologi, tenaga kerja terampil, dan industri pendukung belum tentu tumbuh sebanding.



Dampak struktural berpotensi terbatas

Produktivitas, kompleksitas ekspor, penciptaan pekerjaan berkualitas, dan nilai tambah domestik bisa tertinggal dari pertumbuhan investasi.

Agenda kebijakan	Perubahan yang diperlukan
Strategi industri	Dari daftar proyek sektoral menuju strategi pengembangan rantai nilai industri yang terintegrasi.
Hilirisasi	Dari pembangunan fasilitas pengolahan menuju penguasaan teknologi, produk lanjutan, dan pemasok lokal.
Insentif investasi	Dari insentif berdasarkan nilai modal menuju insentif berbasis hasil dan kinerja terukur.
Perdagangan	Dari pembatasan impor secara umum menuju perlindungan yang terarah dan akses input yang kompetitif.
Tenaga kerja	Dari jumlah pekerjaan menuju pekerjaan formal, kenaikan upah riil, keterampilan, dan produktivitas.
Ekspor	Dari peningkatan nilai ekspor menuju diversifikasi produk, peningkatan kompleksitas, dan nilai tambah domestik.
Tata kelola	Dari kebijakan yang terfragmentasi menuju koordinasi lintas kementerian dan kepastian regulasi.

Indikator untuk Menguji Apakah Kebijakan Berhasil

- **Produktivitas:** pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dan total factor productivity (TFP).
- **Pendalaman industri:** nilai tambah domestik, keterkaitan hulu-hilir, serta kontribusi pemasok nasional.
- **Daya saing perdagangan:** kompleksitas ekspor, diversifikasi pasar, dan partisipasi dalam rantai nilai global.
- **Kualitas investasi:** proyek yang benar-benar beroperasi, alih teknologi, dan investasi lanjutan.
- **Ketenagakerjaan:** pekerjaan formal baru, upah riil, keterampilan, dan produktivitas pekerja.
- **Keberlanjutan:** intensitas energi dan emisi, biaya lingkungan, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.